

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap PERKARA NOMOR : 91-19-07/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang)

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON | |
| NOMOR | 91.19.07/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI | : SEMIN |
| TANGGAL | : 15. JULI 2019 |
| JAM | : 08.54 WIB |

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 230/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

| | | |
|----|---|------------------------------|
| 1 | Zahru Arqom, SH., M.H.Li | NIA : 02.11294 |
| 2 | Imam Munandar, SH. | NIA : 13.00338 |
| 3 | Tito Prayogi, SHI., SH., MH. | NIA : 14.02073 |
| 4 | Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum. | NIA : 00.12190 |
| 5 | Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6 | Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,M.H.Li. | NIA : 11.10054 |
| 7 | Muhammad Adi Sunata, S.H.: | NIA : 12.00040 |
| 8 | Herlin Susanto, S.H. | NIA : 13.00298 |
| 9 | Nora Herlianto, S.H.; | NIA : 10.02186 |
| 10 | Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH. | NIA : 19.01290 |
| 11 | Yuni Iswanto, SH. | NIA : 18.00843 |
| 12 | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA : 18.00802 |
| 13 | Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14 | Ahmad Ali Fahmi, S.H. | NIA : 12.00053 |
| 15 | Muhamad Arifudin, S.H. | NIA : 13.01641 |
| 16 | Wilhelmus Rio Resandhi, S.H | NIA : 18.01964 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kesemuanya adalah advokat pada Kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email : office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam PERKARA NOMOR : 91-19-07/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRA dan DPRK dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya UU Pemilu) mengatur, "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*". Kemudian, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu mengatur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan Pemilihan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Propinsi Bangka Belitung.
 - a. Menurut Permohonan Pemohon terjadi adanya Penghilangan / Pengurangan Suara atau terjadi perbedaan hasil perhitungan suara di TPS 2, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang dan TPS 04 Kelurahan Gedung Nasional, Kec. Taman Sari, Kota Pangkalpinang Propinsi Bangka Belitung.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- b. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk kepada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu :

- (1) *Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.*
 - (2) *Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.*
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 4 Tahun 2019") telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019

- (1) *Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
 - (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*
 - (5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
 - (6) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.*
 - (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
 - (8) Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.*
 - (9) PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.*
 - (10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.*
 - (11) PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.*
 - (12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- d. Bahwa selanjutnya merujuk upaya hukum keberatan oleh Pemohon tersebut kemudian sudah dilakukan penyelesaian masalah yakni dengan dilakukannya penghitungan suara ulang di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- e. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Gerunggang dan Kecamatan Taman Sari, sudah melakukan Penghitungan Suara Ulang.
- f. Bahwa Permohonan Pemohon tidak mencantumkan petitum : Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sehingga perkara *a quo* adalah bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya.

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, permasalahan telah diselesaikan sesuai ketentuan pelaksanaan Pemilu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018), pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu dan permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Berikut merupakan kutipan lengkap pasal tersebut :

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Pasal 7 PMK No. 2 Tahun 2018

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu.*
 - (2) Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.*
- 2) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya "PMK No. 6 Tahun 2018"), kedudukan hukum Pemohon memuat, "*penjelasan sebagai partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu serta keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu*".
 - 3) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan hukum Pemohon cacat formil, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima;

- 2) Bahwa apa yang diminta oleh Pemohon dalam keberatannya sudah SELESAI karena telah dilakukan penghitungan suara ulang telah dilaksanakan oleh PPK Kecamatan sehingga menjadi kabur pula Permohonan yang berisi permohonan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah selesai.
- 3) Petitum Pemohon keliru karena tidak memuat Petitum yang berisi tentang :

Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Namun, Pemohon langsung meminta pembatalan untuk Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 sepanjang untuk Dapil Pangkalpinang 3 dan penetapan perbaikan perolehan suara Pemohon dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 sepanjang untuk Dapil Pangkalpinang 3.

Bahwa objek permohonan Pemohon termasuk tidak jelas dan ambigu serta bukan termasuk dalam kualifikasi sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Dapil, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI BANGKA BELITUNG

**2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PANGKALPINANG**

2.1.1.1. DAPIL PANGKALPINANG 3

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
KECAMATAN TAMAN SARI DAN KECAMATAN
GRUNGGANG**

A. KECAMATAN TAMAN SARI

| DESA | | PEMOHON | | TERMOHON | |
|-----------------|--------|---------|--------|----------|--------|
| | | PBB | NASDEM | PBB | NASDEM |
| Desa Opas Indah | | 57 | 138 | 57 | 138 |
| 1) | TPS 01 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2) | TPS 02 | 18 | 9 | 18 | 9 |
| 3) | TPS 03 | 3 | 13 | 3 | 13 |
| 4) | TPS 04 | 4 | 2 | 4 | 2 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 5) | TPS 05 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| 6) | TPS 06 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| 7) | TPS 07 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 8) | TPS 08 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 9) | TPS 09 | 9 | 15 | 9 | 15 |
| 10) | TPS 10 | 3 | 16 | 3 | 16 |
| 11) | TPS 11 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 12) | TPS 12 | 3 | 19 | 3 | 19 |
| 13) | TPS 13 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Desa Gedung Nasional | | 82 | 162 | 82 | 162 |
| 1) | TPS 01 | 6 | 13 | 6 | 13 |
| 2) | TPS 02 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 3) | TPS 03 | 9 | 6 | 9 | 6 |
| 4) | TPS 04 | 10 | 20 | 10 | 23 |
| 5) | TPS 05 | 13 | 23 | 13 | 23 |
| 6) | TPS 06 | 2 | 30 | 2 | 30 |
| 7) | TPS 07 | 11 | 16 | 11 | 16 |
| 8) | TPS 08 | 25 | 18 | 25 | 18 |
| 9) | TPS 09 | 2 | 24 | 2 | 24 |
| Desa Batin Tikal | | 50 | 391 | 50 | 391 |
| 1) | TPS 01 | 1 | 59 | 1 | 59 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2) | TPS 02 | 1 | 64 | 1 | 64 |
| 3) | TPS 03 | 2 | 57 | 2 | 57 |
| 4) | TPS 04 | 18 | 20 | 18 | 20 |
| 5) | TPS 05 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 6) | TPS 06 | 6 | 17 | 6 | 17 |
| 7) | TPS 07 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 8) | TPS 08 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 9) | TPS 09 | 14 | 26 | 14 | 26 |
| 10) | TPS 10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11) | TPS 11 | 2 | 54 | 2 | 54 |
| 12) | TPS 12 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 13) | TPS 13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Desa Rawa Bangun | | 82 | 165 | 82 | 165 |
| 1) | TPS 01 | 14 | 19 | 14 | 19 |
| 2) | TPS 02 | 20 | 12 | 20 | 12 |
| 3) | TPS 03 | 5 | 11 | 5 | 11 |
| 4) | TPS 04 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| 5) | TPS 05 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 6) | TPS 06 | 6 | 37 | 6 | 37 |
| 7) | TPS 07 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| 8) | TPS 08 | 10 | 16 | 10 | 16 |
| 9) | TPS 09 | 8 | 14 | 8 | 14 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| Desa Kejaksaan | | 415 | 290 | 415 | 290 |
|-------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 1) | TPS 01 | 31 | 12 | 31 | 12 |
| 2) | TPS 02 | 44 | 18 | 44 | 18 |
| 3) | TPS 03 | 42 | 3 | 42 | 3 |
| 4) | TPS 04 | 18 | 12 | 18 | 12 |
| 5) | TPS 05 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| 6) | TPS 06 | 8 | 32 | 8 | 32 |
| 7) | TPS 07 | 71 | 21 | 71 | 21 |
| 8) | TPS 08 | 26 | 10 | 26 | 10 |
| 9) | TPS 09 | 10 | 13 | 10 | 13 |
| 10) | TPS 10 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| 11) | TPS 11 | 16 | 24 | 16 | 24 |
| 12) | TPS 12 | 24 | 21 | 24 | 21 |
| 13) | TPS 13 | 11 | 5 | 11 | 5 |
| 14) | TPS 14 | 8 | 37 | 8 | 37 |
| 15) | TPS 15 | 47 | 12 | 47 | 12 |
| 16) | TPS 16 | 23 | 11 | 23 | 11 |
| 17) | TPS 17 | 13 | 9 | 13 | 9 |
| 18) | TPS 18 | 3 | 14 | 3 | 14 |
| B. KECAMATAN GERUNGANG | | | | | |
| Desa/Kelurahan | | 75 | 85 | 75 | 85 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| | | | | | |
|-----------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Taman Bunga | | | | | |
| 1) | TPS 01 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2) | TPS 02 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| 3) | TPS 03 | 1 | 12 | 1 | 12 |
| 4) | TPS 04 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 5) | TPS 05 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6) | TPS 06 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7) | TPS 07 | 2 | 14 | 2 | 14 |
| 8) | TPS 08 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 9) | TPS 09 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 10) | TPS 10 | 10 | 7 | 10 | 7 |
| 11) | TPS 11 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 12) | TPS 12 | 17 | 3 | 17 | 3 |
| Desa/Kelurahan | | 257 | 136 | 257 | 136 |
| Bukit Merapin | | | | | |
| 1) | TPS 01 | 16 | 10 | 16 | 10 |
| 2) | TPS 02 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| 3) | TPS 03 | 10 | 7 | 10 | 7 |
| 4) | TPS 04 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5) | TPS 05 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 6) | TPS 06 | 8 | 3 | 8 | 3 |
| 7) | TPS 07 | 18 | 0 | 18 | 0 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 8) | TPS 08 | 11 | 5 | 11 | 5 |
| 9) | TPS 09 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10) | TPS 10 | 17 | 1 | 17 | 1 |
| 11) | TPS 11 | 18 | 2 | 18 | 2 |
| 12) | TPS 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 13) | TPS 13 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| 14) | TPS 14 | 27 | 4 | 27 | 4 |
| 15) | TPS 15 | 16 | 6 | 16 | 6 |
| 16) | TPS 16 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 17) | TPS 17 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| 18) | TPS 18 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 19) | TPS 19 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| 20) | TPS 20 | 11 | 2 | 11 | 2 |
| 21) | TPS 21 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 22) | TPS 22 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 23) | TPS 23 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 24) | TPS 24 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Desa Bukit Sari | | 168 | 143 | 168 | 143 |
| 1) | TPS 01 | 28 | 9 | 28 | 9 |
| 2) | TPS 02 | 24 | 9 | 24 | 9 |
| 3) | TPS 03 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| 4) | TPS 04 | 21 | 6 | 21 | 6 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| | | | | | |
|----------------------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| 5) | TPS 05 | 11 | 1 | 11 | 1 |
| 6) | TPS 06 | 6 | 11 | 6 | 11 |
| 7) | TPS 07 | 6 | 26 | 6 | 26 |
| 8) | TPS 08 | 9 | 13 | 9 | 13 |
| 9) | TPS 09 | 13 | 9 | 13 | 9 |
| 10) | TPS 10 | 8 | 20 | 8 | 20 |
| 11) | TPS 11 | 16 | 10 | 16 | 10 |
| 12) | TPS 12 | 5 | 16 | 5 | 16 |
| 13) | TPS 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Desa Tua Tunu Indah | | 202 | 57 | 202 | 57 |
| 1) | TPS 01 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 2) | TPS 02 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3) | TPS 03 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 4) | TPS 04 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5) | TPS 05 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6) | TPS 06 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 7) | TPS 07 | 14 | 1 | 14 | 1 |
| 8) | TPS 08 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 9) | TPS 09 | 24 | 2 | 24 | 2 |
| 10) | TPS 10 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 11) | TPS 11 | 13 | 3 | 13 | 3 |
| 12) | TPS 12 | 19 | 4 | 19 | 4 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 13) | TPS 13 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 14) | TPS 14 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 15) | TPS 15 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 16) | TPS 16 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 17) | TPS 17 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 18) | TPS 18 | 17 | 5 | 17 | 5 |
| 19) | TPS 19 | 15 | 5 | 15 | 5 |
| 20) | TPS 20 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 21) | TPS 21 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 22) | TPS 22 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Desa | | 318 | 196 | 318 | 196 |
| Kacang Pedang | | | | | |
| 1) | TPS 01 | 21 | 12 | 21 | 12 |
| 2) | TPS 02 | 14 | 17 | 13 | 17 |
| 3) | TPS 03 | 14 | 21 | 14 | 21 |
| 4) | TPS 04 | 35 | 7 | 35 | 7 |
| 5) | TPS 05 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 6) | TPS 06 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 7) | TPS 07 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8) | TPS 08 | 20 | 8 | 20 | 8 |
| 9) | TPS 09 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 10) | TPS 10 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| 11) | TPS 11 | 54 | 19 | 54 | 19 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| 12) | TPS 12 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 13) | TPS 13 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 14) | TPS 14 | 25 | 7 | 25 | 7 |
| 15) | TPS 15 | 21 | 8 | 21 | 8 |
| 16) | TPS 16 | 39 | 7 | 39 | 7 |
| 17) | TPS 17 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| 18) | TPS 18 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| Desa Air Kepala Tujuh | | 115 | 59 | 115 | 59 |
| 1) | TPS 01 | 12 | 4 | 12 | 4 |
| 2) | TPS 02 | 16 | 11 | 16 | 11 |
| 3) | TPS 03 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4) | TPS 04 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 5) | TPS 05 | 18 | 4 | 18 | 4 |
| 6) | TPS 06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | TPS 07 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| 8) | TPS 08 | 15 | 6 | 15 | 6 |
| 9) | TPS 09 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 10) | TPS 10 | 14 | 3 | 14 | 3 |
| 11) | TPS 11 | 11 | 2 | 11 | 2 |
| 12) | TPS 12 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 13) | TPS 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
KABUPATEN PANGKALPINANG**

| No. | KECAMATAN | PEMOHON | | TERMOHON | |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | PBB | NASDEM | PBB | NASDEM |
| 1. | Taman Sari | 686 | 1.143 | 686 | 1.146 |
| 2. | Gerunggang | 1.136 | 676 | 1.135 | 676 |
| JUMLAH | | 1.822 | 1.819 | 1.821 | 1.822 |

**Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
KABUPATEN PANGKALPINANG DAPIL PANGKAL PINANG
3**

| No. | PARTAI | PEROLEHAN SUARA MENURUT | | Selisih |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| | | TERMOHO N | PEMOHO N | |
| 1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 2.003 | 2.003 | 0 |
| 2. | PARTAI GERINDRA | 3.659 | 3.659 | 0 |
| 3. | PDI PERJUANGAN | 3.303 | 3.303 | 0 |
| 4. | PARTAI GOLKAR | 3.377 | 3.377 | 0 |
| 5. | PARTAI NASDEM | 1.822 | 1.822 | 3 |
| 6. | PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA | 109 | 109 | 0 |
| 7. | PARTAI BERKARYA | 1.290 | 1.290 | 0 |
| 8. | PARTAI KEADILAN SEJAHTRA | 2.713 | 2.713 | 0 |
| 9. | PARTAI PERSATUAN INDONESIA | 930 | 930 | 0 |
| 10. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 3.545 | 3.545 | 0 |
| 11. | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | 126 | 126 | |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| | | | | |
|------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------|
| 12. | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1.994 | 1.994 | 0 |
| 13. | PARTAI HANURA | 1.357 | 1.357 | 0 |
| 14. | PARTAI DEMOKRAT | 3.044 | 3.044 | 0 |
| 15. | PARTAI BULAN BINTANG | 1.821 | 1.822 | 1 |
| 16. | PKPI | 543 | 543 | 0 |

TANGGAPAN TERMOHON ATAS DALIL PEMOHON

1) Dalil pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pangkalpinang untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Dapil Kota Pangkalpinang 3 (Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Gerunggang) yang meliputi :

- **TPS 02 Desa Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang adalah tidak benar.**

Hasil perhitungan suara yang benar menurut KPU Kota Pangkalpinang/Termohon adalah :

| KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS | | PEROLEHAN SUARA MENURUT | |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| | | PEMOHON | TERMOHON |
| Kecamatan Gerunggang | | | |
| Desa Kacang Pedang | | | |
| TPS 02 | | | |
| 19 | PARTAI BULAN BINTANG | 0 | 0 |
| 1 | TAUFIK | 3 | 2 |
| 2 | HERI SUSENO PUTRO, S.H | 2 | 2 |
| 3 | FERANDA | 0 | 0 |
| 4 | WAHYUDIN | 1 | 1 |
| 5 | FERRY ANTONI | 0 | 0 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS | | PEROLEHAN SUARA MENURUT | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| | | PEMOHON | TERMOHON |
| 6 | LISSANDRA PURNAMI YANTIKAH | 0 | 0 |
| 7 | ZAKARIA | 0 | 0 |
| 8 | RISKA AMELIA | 8 | 8 |
| JUMLAH | | 14 | 13 |

- 2) Dalil pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 7 (tujuh) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pangkalpinang untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Dapil Kota Pangkalpinang 3 (Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Gerunggang) yang meliputi :

- **TPS 04 Desa Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari adalah tidak benar.**

Berikut hasil perhitungan suara yang benar menurut KPU Kota Pangkalpinang/Termohon adalah :

| KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS | | PEROLEHAN SUARA MENURUT | |
|------------------------------|---------------|----------------------------|----------|
| | | PEMOHON | TERMOHON |
| Kecamatan Taman Sari | | | |
| Desa Gedung Nasional | | | |
| TPS 04 | | | |
| 5 | PARTAI NASDEM | 6 | 4 |
| 1 | SUSTONY, S.H | 0 | 0 |
| 2 | RIDUAN NASRUL | 4 | 1 |
| 3 | JAMILAH | 1 | 0 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

| KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS | | PEROLEHAN SUARA MENURUT | |
|------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| | | PEMOHON | TERMOHON |
| 4 | ASHADI | 0 | 0 |
| 5 | ISKANDAR | 0 | 0 |
| 6 | INDRAWATI | 0 | 18 |
| 7 | SAPUTRA M. | 0 | 0 |
| 8 | JOHARDI | 9 | 0 |
| JUMLAH | | 20 | 23 |

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon

Zahru Arqom, S.H., M.H.Li

Imam Munandar, S.H.,
M.H.

Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.

M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.

Yuni Iswantoro, S.H.

Bagus Setiawan, S.H.

Akhmad Jazuli, S.H., M.H.

Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.

Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li

Muhammad Adi Sunata, S.H.

Herlin Susanto, S.H.

Nora Herlianto, S.H.

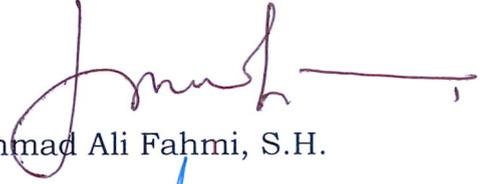
TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.